

USAHA-USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DISEKTOR
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN



KK.
C. 673/98.
LPS
u

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Diajukan oleh :

KANTHI SILMI LESTARI

No. Pokok : 048913054

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997

SKRIPSI

USAHA-USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DISEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

DIAJUKAN OLEH
KANTHI SILMI LESTARI
No. Pokok : 048913054

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,

Drs. Ec. H.R. DJOHAR DJAELANI

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

TANGGAL : 12-1-1998

KETUA JURUSAN,

Dra. Ec. H. SRI KUSRENI,MSi

TANGGAL : 12-1-1998.

Surabaya, 7 - 12 - 1997

Disetujui dan siap untuk diuji
Dosen Pembimbing



Drs. Ec. R. DJOHAR DJAELANI

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB pada Tahun Anggaran 1992/1993 sampai dengan 1996/1997 yang pemungutannya dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan analisa pada masing-masing sektor, baik pada PKB maupun BBNKB dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun, maka secara garis besar penelitian ini dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah, kenyataannya merupakan sumber penerimaan andalan bagi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur mengingat kontribusinya dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah mencapai kurang lebih sebesar 84 % dari keseluruhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan keberhasilan perolehan hasilnya sangat ditentukan oleh kemampuan Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan pemungutan secara berdayaguna dan berhasil guna.
- b. Pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB tersebut pada

Dinas Pendapatan Daerah secara keseluruhan telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai baik berupa sarana administrasi yang memanfaatkan sistim komputerisasi maupun sarana operasional yang telah dilengkapi perangkat pelaksana sanksi yaitu Juru Sita sebagai pelaksana penagihan dengan surat paksa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai pelaksana dari pelanggaran pidana.

Disamping pemungutannya juga telah tersusun dalam suatu mekanisme pemungutan yang baik dan telah mengandung sistim pengawasan melekat, sehingga kebocoran-kebocoran terhadap hasil pemungutan sangat kecil kemungkinannya.

- c. Namun kenyataan menunjukkan bahwa dukungan penerimaan PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir semakin menurun, yaitu sebesar 85,17 pada tahun 1994/1995, turun menjadi sebesar 84,63 %, tahun 1995/1996 dan pada tahun 1996/1997 turun menjadi sebesar 84,31 dan berakibat pula kepada turunnya dukungan Pendapatan Asli Daerah kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yaitu pada tahun anggaran 1996/1997 mengalami penurunan dibandingkan dengan dukungan pada Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu dari 29,86 % menjadi 26,35 %,.
- d. Dari hasil analisa pada masing-masing penerimaan, baik kemampuan dukungan PKB terhadap PAD maupun BBNKB dalam mendukung PAD, dapat disimpulkan bahwa pada kenyataan-

nya prosentase kenaikan realisasi penerimaan PKB setiap tahun belum bisa mengikuti prosentase kenaikan realisasi PAD dan setiap tahun yaitu pada tahun anggaran 1992/1993 ke 1993/1994 kenaikan PKB sebesar 11,72% sedangkan kenaikan PAD sebesar 23,20, 1993/1994 ke 1994/1995, kenaikan PKB sebesar 40,46 % sedangkan kenaikan PAD sebesar 45,73 %, 1994/1995 ke 1995/1996 kenaikan PKB sebesar 18,64 % sedangkan kenaikan PAD sebesar 29,35 dan pada tahun anggaran 1995/1996 ke 1996/1997 kenaikan PKB sebesar 13,99 % sedangkan kenaikan PAD sebesar 14,64.

Sedangkan untuk BBNKB prosentasenya telah dapat mengikuti prosentase kenaikan realisasi PAD yaitu pada tahun anggaran 1992/1993 ke 1993/1994 BBNKB meningkat sebesar 34,34 % sedangkan PAD meningkat sebesar 23,20, 1993/1994 ke 1994/1995 BBNKB meningkat sebesar 58,58 % sedangkan PAD meningkat sebesar 45,73 %, Tahun 1994/1995 ke 1995/1996 BBNKB meningkat sebesar 35,83 % sedangkan PAD meningkat sebesar 29,35, meskipun pada tahun 1996/1997 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 03,36 % dibanding dengan prosentase peningkatan PAD yang sebesar 14,64 %.

- e. Analisa terhadap Tunggakan PKB menunjukkan bahwa jumlah tunggakan tersebut setiap tahun selalu meningkat yaitu sebesar 1.532.962.800,00 pada tahun anggaran 1992/1993 ke 1993/1994 atau sebesar 28,98 %, pada tahun anggaran 1993/1994 ke 1994/1995 meningkat

sebesar Rp.1.919.800.143,00 atau sebesar 28,02 %, pada tahun anggaran 1994/1995 ke 1995/1996 sebesar Rp.908.312.380,00 atau sebesar 10,32 %, pada tahun anggaran 1995/1996 ke 1996/1997 sebesar Rp.1.122.885.581,00 atau sebesar 11,56 %, dan apabila tunggakan tersebut dibandingkan dengan realisasi PKB setiap tahun, nampak bahwa tunggakan tersebut cukup berarti bagi penerimaan PKB karena mempunyai prosentase yang cukup besar yaitu sebesar 6,69 % pada tahun anggaran 1992/1993, sebesar 6,43 % pada tahun anggaran 1993/1994, sebesar 5,23 % pada tahun anggaran 1994/ 1995, sebesar 4,24 % pada tahun anggaran 1995/1996, sebesar 4,58 % pada tahun anggaran 1996/1997.

- f. Kecenderungan penurunan kontribusi penerimaan PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada kenyataannya telah diikuti pula dengan kecenderungan peningkatan jumlah tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- g. Hasil pemungutan PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam 3 (tahun) terakhir tersebut diatas akan mendapatkan hasil yang berbeda seandainya Tunggakan Pembayaran tersebut dapat terealisasi menjadi suatu penerimaan secara riil, dan bahkan akan memungkinkan semakin besarnya kontribusi penerimaan PKB dan BBNKB terhadap

struktur Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Jawa Timur.

- h. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam meningkatkan penerimaan PKB dan BBNKB yang telah ditempuh melalui berbagai kegiatan selama ini cukup tepat karena salah satu upayanya telah diarahkan kepada pencairan tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui pelaksanaan penagihan secara langsung pada masing-masing obyek Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan daftar ulang dengan memanfaatkan keberadaan Tim Intesifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Tingkat II yang berada pada masing-masing Daerah Tingkat II diseluruh Jawa Timur.

2. Saran

Adapun saran yang dapat kami sampaikan atas hasil penelitian ini adalah :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam menetapkan kebijakan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar diprioritaskan kepada upaya merealisasi pencairan tunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor mengingat jumlah tunggakan tersebut cukup besar prosentasenya yaitu sebesar 6,69 % pada tahun anggaran 1992/1993, sebesar 6,43 % pada tahun anggaran 1993/1994, sebesar 5,23 % pada tahun anggaran 1994/ 1995, sebesar 4,24 % pada tahun

anggaran 1995/1996, sebesar 4,58 % pada tahun anggaran 1996/1997. Disamping juga diupayakan agar pada tahun-tahun mendatang tidak timbul tunggakan PKB.

- b. Kebijakan peningkatan penerimaan melalui pelaksanaan penagihan secara langsung pada masing-masing obyek PKB dan BBNKB yang menunggak pembayaran dengan memanfaatkan keberadaan Tim Intensifikasi PKB dan BBNKB Tingkat II yang berada pada masing-masing Daerah Tingkat II diseluruh Jawa Timur agar lebih ditingkatkan, mengingat masih banyaknya tunggakan.
- c. Pemanfaatan Tim Intensifikasi PKB dan BBNKB Daerah Tingkat I untuk melaksanakan penagihan perlu diikuti pula dengan pelaksanaan sanksi kepada masing-masing Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang pelaksanaannya memanfaatkan keberadaan Juru Sita yang ada pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I diseluruh Jawa Timur dalam pemberian peringatan dan penjelasan tentang ketentuan sanksi yang agar pada akhirnya ditindak lanjuti dengan penagihan surat paksa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.